

**LAPORAN**

**KETERANGAN PERTANGGUNG**

**JAWABAN**

**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Tahun Anggaran 2022**

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**DINAS PERHUBUNGAN**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

|  |
| --- |
| Padang,Januari 2023 |
| KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  PROVINSI SUMATERA BARAT |
|  |
| DEDY DIANTOLAN, S.Sos., MM |
| Pembina Utama Muda  NIP. 19721222 199403 1 002 |

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR 1](#_Toc92444719)

[DAFTAR ISI 2](#_Toc92444720)

[BAB I DATA / INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT 3](#_Toc92444721)

[BAB IIPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT 9](#_Toc92444722)

[2.1.CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN 9](#_Toc92444723)

[1.Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 9](#_Toc92444724)

[2.Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran 9](#_Toc92444725)

[3.Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 21](#_Toc92444726)

[2.2.KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN 27](#_Toc92444727)

[2.3.TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA 28](#_Toc92444728)

[1.Tindak Lanjut rekomendasi DPRD : 28](#_Toc92444729)

[2.Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ 33](#_Toc92444730)

[3.Tindak Lanjut rekomensai Fraksi 33](#_Toc92444731)

[2.4.PENGHARGAAN YANG DITERIMA 34](#_Toc92444732)

[BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUANDAN PENUGASAN 35](#_Toc92444733)

[3.1.URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN 35](#_Toc92444734)

[1.Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya 35](#_Toc92444735)

[2.Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya 35](#_Toc92444736)

[3.2.HAMBATAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN 35](#_Toc92444737)

[1.Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya 35](#_Toc92444738)

[2.Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya 35](#_Toc92444739)

[BAB IV PENUTUP 36](#_Toc92444740)

# **BAB I**

# DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANGDILAKSANAKAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

1. **GAMBARAN UMUM DAERAH PADA UNIT SKPD DINAS PERHUBUNGAN**

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam kedudukan sebagai salah satu Dinas dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dituntut untuk dapat mewujudkan Kinerja Aparatur Pemerintah dan kelembagaan daerah dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan Darat dan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Permasalahan dan tantangan dalam pelayanan transportasi pada umumnya, masih dihadapkan pada peningkatan keselamatan,peningkatan kelancaran mobilitas serta masalah aksesibilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil seperti Kepulauan Mentawai dan sekitarnya, yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai. Selain itu masalah daya beli masyarakat yang masih rendah, dibanding biaya operasi dan investasi prasarana dan sarana transportasi, masih memerlukan subsidi operasi dan dukungan investasi pemerintah yang cukup besar dalam upaya menyelenggarakan pelayanan transportasi yang murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Tantangan dalam program reformasi di bidang transportasi, terutama dalam pelaksanaan dekosentrasi dan reposisi kelembagaan pemerintah di bidang transportasi untuk lebih memperjelas peran dan fungsi pemerintah, perlu lebih ditekankan pada peran regulator, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi peran serta swasta dan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang efisien, akuntabel, kompetitif dan professional.

1. **TugasPokok dan Fungsi**

Menurut Peraturan Gubernur (pergub) Sumatera Barat No. 03/2018 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. TugasPokok

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan.

1. Fungsi
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
4. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan LingkupProvinsi dan Kabupaten/Kota.
5. PelaksanaanKesekretariatan Dinas.
6. Pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, Bidang Angkutan Jalan,Perkeretaapian dan Pengembangan, dan Pelayaran.
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
   * + 1. **KepalaDinas**
          1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
          2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
          3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan;
          4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Perhubungan;
          5. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
          6. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, LKPJ, dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan ;
          7. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Perhubungan;
          8. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerjaterkait;
          9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olehPimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

1. Sekretariat;
2. Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan;
3. Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan;
4. Bidang Pelayaran;
5. UPT; dan
6. Kelompok jabatan Fungsional.
   * + 1. **Sekretariat**

Mempunyai tugas Pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Hubungan masyarakat, protokol, penyusunan Program dan Keuangan .

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Sekretariat dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas Pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas Pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program dan Keuangan.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

* + - 1. **BIDANG LALU LINTAS DAN PEMBINAAN KESELAMATAN**

Bidang Lalulintas dan Keselamatan mempunyai tugas Pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Bidang Lalu lintas dan Pembinaan Keselamatan serta Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Lalu lintas dan Pembinaan Keselamatan .

Bidang Keselamatan Angkutan Darat dibantu oleh:

1. Seksi Lalu lintas.

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lalu lintas serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas Jalan .

1. Seksi Pengendalian Operasional.

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Operasional serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Bidang Pengendalian operasional.

* + - 1. **BIDANG ANGKUTAN JALAN, PERKERETAAPIAN DAN PENGEMBANGAN**

Mempunyai tugas Pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasiBidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan .

Bidanginimembawahi:

1. SeksiPerkeretaapian

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Perkeretaapian.

1. Seksi Pengembangan

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang pengembangan, pengelolaan system informasi manjemen dan komunikasi transportasi, pengembangan transportasi serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi Bidang Pengembangan.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang KepalaSeksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan.

* + - 1. **BIDANG PELAYARAN**

Bidang Pelayaran mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayaran serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi Bidang Pelayaran.

Bidang Pelayaran dibantu oleh:

1. Seksi Badan Usaha dan Jasa terkait angkutan Pelayaran

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Perizinan Usaha Angkutan Pelayaran serta Penerapan teknologi informasi dan komunikasi Bidang Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran.

1. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan pelayaran rakyat serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang Angkutan pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran.

1. **UPTD Terminal**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penunjang dinas di bidang penyelenggaraan prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam operasional pengelolaan terminal tipe B.

Wilayah kerja UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi :

1. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I berkedudukan di Padang, meliputi terminal Sago Painan dan terminal Sawahlunto.
2. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II berkedudukan di Padang Panjang, meliputi terminal Bukit Surungan Padang Panjang, terminal Koto Nan Ampek Payakumbuh dan terminal Piliang Batusangkar.

Susunanorganisasi UPTD prasarana perhubungan lalu lilntas dan angkutan jalan terdiri atas :

1. Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. SeksiPenyelenggaraan Terminal;
4. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal;
5. Terminal; dan
6. KelompokJabatanFungsional.

KepalaUPTD :

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. UPTD Pengelolaan Terminal Tipe B memiliki fungsi :

* Menyusun program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang angkutan jalan.
* Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang ketatausahaan;
* Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan terminal
* Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan terminal;
* Melaksanakan evaaluasi kinerja pelayanan terminal penumpang angkutan jalan

Kepala UPTD membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Mempunyaitugas:

Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang ketatusahaan UPTD pengelolaan terminal tipe B;

Pengusulan dan penetapan operator operasional, operator sistem tiket dan satuan tugas pengamanan;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang sarana dan prasarana UPTD pengelolaan terminal tipe B;

Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang operasional UPTD pengelolaan terminal tipe B.

1. Kepala Seksi Penyelenggaran terminal

Mempunyaitugas :

* Menyiapkan / melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data operasional terminal;
* Menyiapkan / melaksanakanbahan–bahan pengaturan operasional terminal;
* Menyiapkan / melaksanakan bahan–bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan terminal;
* Menyiapkan/melaksanakan pemungutan retribusi pada terminal;
* Menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan terminal;
* melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal

* Menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan pengawasan operasional terminal;
* Menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan kegiatan peningkatan keselamatan angkutan penumpang umum;
* Menyiapkan/melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban operasional terminal;
* Menyiapkan/melaksanakan fasilitas pengawasan teknis dan laik jalan serta penegakan hukum dan pemantauan kinerja angkutan umum;
* Menyiapkan/melaksanakan pemantauan manajemen keselamatan, kinerja pelayanan angkutan orang dan kinerja perusahaan angkutan orang;
* melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

# BAB II

# PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHYANG DILAKSANAKAN DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

## CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.**17.260.017,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.16.713.545.918,70** atau **96,83%,** dengan uraian sebagai berikut:

### Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

**Tabel 2.1**

**Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja**

**Pada Perjanjian Kinerja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Program** | **Indikator Kinerja** | **Target Kinerja**  **(Perjanjian Kinerja)** | **Realisasi** | **Capaian Kinerja**  **(%)** |
| **1** |  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| I | Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Jumlahtrayek yang di akses | 5 Trayek | 5 Trayek | 100 |
| Program PengelolaanPelayaran |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Jumlah penumpang terangkut angkutan umum | 19.000.000 Orang | 18.650.012Orang | 98,15 |
| II | Meningkatnya kinerja lalu lintas dijalan Provinsi | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | V/C Rasio di jalan Provinsi | 0,52 | 0,53 |  |
| III | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Nilai evaluasiakuntabilitaskinerja | BB (71,00) | BB (71,83) | 101,169 |
| IV | Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi | 79 | 79,58 | 100,73 |

### Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

**Tabel 2.2**

**Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran**

| **NO.** | **Program / Kegiatan** | **Kebijakan** | **Target dalamdokumenanggaran** | **Realisasi** | **Capaian Kinerja (%)** | **AlokasiAnggaran** | **RealisasiAnggaran** | **Persentaserealisasi (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **I** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI** |  |  |  |  | **12.827.548.776** | **12.418.265.542,80** | 96,65% |
|  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** |  |  |  |  | **212.697.210** | **208.754.726,00** | 98,18% |
|  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100 | 92.378.170 | 89.935.176,00 | 97,36 |
|  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 | 120.319.040 | 118.819.550,00 | 98,75 |
| 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |  |  |  |
| 85 Buku | 85 Buku | 100 |  |  |  |
| **2.** | **AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah** |  |  | 100 | **8.789.728.168** | **8.502.608.599,00** |  |
|  | PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN | 95 orang | 95 orang | 100 | 8.500.719.778 | 8.221.061.578,00 | 96,71 |
|  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 17 Orang | 17 Orang | 100 | 187.610.000 | 182.924.500,00 | 97,50 |
|  | Koordinasi dan PenyusunanLaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 37.829.750 | 35.954.721,00 | 95,04 |
|  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Dokumen | 14 Dokumen | 100 | 63.568.640 | 62.667.800,00 | 98,58 |
| **3.** | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** |  |  | 100 | **87.543.000** | **82.911.408,00** |  |
|  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 42.543.000 | 42.466.462,00 | 99,82 |
|  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD | 7 unitkendaraandinas 1 unit Rumah Dinas | 7 unitkendaraandinas 1 unit Rumah Dinas | 100 | 45.000.000 | 40.444.946,00 | 89,88 |
| 4. | **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah** |  |  | 100 | **128.874.750** | **89.528.331,00** |  |
|  | PelaporanPengelolaanRetribusi Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 128.874.750 | 89.528.331,00 | 69,47 |
| **5.** | **AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah** |  |  | 100 | **163.076.949** | **162.692.636,00** |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 122 Stel | 122 Stel | 100 | 95.000.000 | 94.840.790,00 | 99,83 |
|  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 kali | 16 kali | 106 | 68.076.949 | 67.851.846,00 | 99,67 |
| **6.** | **AdministrasiUmumPerangkat Daerah** |  |  | 100 | **629.442.585** | **627.998.242,00** |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 35.000.000 | 34.989.000,00 | 99,97 |
|  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Bracket Standing TV | 1 Bracket Standing TV | 100 | 11.556.760 | 11.355.500,00 | 98,26 |
| 3 Plakat | 3 Plakat |  |  |  |
| 12 Bulan | 12 Bulan |  |  |  |
|  | PenyediaanBahanLogistik Kantor | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 156.309.800 | 155.343.800,00 | 99,38 |
|  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 | 55.000.000 | 54.988.258,00 | 99,98 |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3 Jenis | 3 Jenis | 100 | 26.000.000 | 25.935.000,00 | 99,75 |
|  | PenyelenggaraanRapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 345.576.025 | 345.386.684,00 | 99,95 |
| **7.** | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** |  |  |  | **337.820.646** | **321.660.450,00** |  |
|  | Pengadaan Mebel | 4RakArsip | 4RakArsip | 100 | 63.312.800 | 60.660.000,00 | 95,81 |
| 2 Kursi Hadap Meja Ess IV | 2 Kursi Hadap Meja Ess IV |
| 10 KursiRapat | 10 KursiRapat |
| 2 MejaKerjaEss III | 2 MejaKerjaEss III |
| 2 KursiKerjaEss IV | 2 KursiKerjaEss IV |
|  |  | 2 Kursi Hadapan MejaEss IV | 2 Kursi Hadapan MejaEss IV |
| 3 Kursi Hadapan Meja Ess II dan III | 3 Kursi Hadapan Meja Ess II dan III |
| 1 KursiKerjaEss IIII | 1 KursiKerjaEss IIII |
|  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 Dispenser | 1 Dispenser | 100 | 229.686.326 | 216.605.250,00 | 94,30 |
| 1 Kulkas | 1 Kulkas |
| 1 Tablet | 1 Tablet |
| 1 Vacum Cleaner | 1 Vacum Cleaner |
| 2 AC Split 1.5 PK | 2 AC Split 1.5 PK |
| 2 AC Split 2 PK | 2 AC Split 2 PK |
| 3 Pc | 3 Pc |
| 5 Printer | 5 Printer |
| 1 Smart Tv | 1 Smart Tv |
| 8 Laptop | 8 Laptop |
|  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 PaketKarpet | 1 PaketKarpet | 100 | 44.821.520 | 44.395.200,00 | 99,05 |
| 2 Mouse P.C | 2 Mouse P.C | 100 |
| 2 BuahKipasAngin | 2 BuahKipasAngin | 100 |
| 16  Buah Flash Disk | - | 0 |
| **8.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  |  | **2.000.889.748** | **1.961.285.113,00** |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1400 Surat | 1400 Surat | 100 | 14.000.000 | 13.682.350,00 | 97,73 |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 500 Mbps | 500 Mbps | 100 | 287.446.660 | 277.318.140,00 | 96,48 |
| 3 Rekening | 3 Rekening | 100 |
| 2999 meterkubik | 2999 meterkubik | 100 |
| 104270 KWh | 104270 KWh | 100 |
|  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 5 Supir | 5 Supir | 100 | 1.699.443.088 | 1.670.284.623,00 | 98,28 |
| 18 Pengamanan | 18 Pengamanan | 100 |
| 20 CS | 20 CS | 100 |
| 12 Bulan | 12 Bulan | 100 |
| **9.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  | 100 | **477.475.720** | **460.826.037,80** |  |
|  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan | 17 Unit | 17 Unit | 100 | 257.540.720 | 247.526.030,00 | 96,11 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya | 1 Rumah Dinas | 1 Rumah Dinas | 100 | 178.100.000 | 177.702.017,80 | 99,78 |
| 1 Kantor Induk | 1 Kantor Induk | 100 |
|  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 6 Spesifikasi | 6 Spesifikasi | 100 | 41.835.000 | 35.597.990,00 | 85,09 |
| **II.** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |  |  | 100 | **3.718.357.794** | **3.625.977.943,90** |  |
| **10.** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi** |  |  | 100 | **-** | **-** |  |
|  | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | 0 Dokumen | 0 Dokumen |  | - | - |  |
|  | Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | 0 Kab Kota dan KL | 0 Kab Kota dan KL |  | - | - |  |
| **11.** | **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi** |  |  | 100 | **877.797.082** | **853.902.468,90** |  |
|  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi | 50 Traffic Cone | 50 Traffic Cone | 100 | 686.879.582 | 675.832.633,09 | 98,39 |
| 75 Road Barier | 75 Road Barier |
|  | 3 Ruas Jalan | 3 Ruas Jalan |
| 1 Ruas Jalan Kab Kota | 1 Ruas Jalan Kab Kota |
|  | Rehabilitasi dan PemeliharaanPerlengkapan Jalan | 1 Ruas Jalan | 1 Ruas Jalan | 100 | 190.917.500 | 178.069.835,81 | 93,27 |
| **12.** | **Pengelolaan Terminal PenumpangTipe B** |  |  | 100 | **546.108.250** | **531.731.035,00** |  |
|  | PenyusunanRencana Pembangunan Terminal PenumpangTipe B | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 | 221.963.000 | 219.058.486,00 | 98,69 |
|  | Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal | 5 Terminal 2 UPTD | 5 Terminal 2 UPTD | 100 | 84.145.250 | 81.410.620,00 | 96,75 |
|  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) | 3 Terminal | 3 Terminal | 100 | 125.000.000 | 124.904.735,00 | 99,92 |
|  | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B | 5 Orang & 1 Laporan | 5 Orang & 1 Laporan | 100 | 115.000.000 | 106.357.194,00 | 92,48 |
| **13.** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi** |  |  |  | **1.663.069.659** | **1.654.271.963,00** |  |
|  | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 563.069.659 | 560.057.011,00 | 99,46 |
| 5 Kab Kota | 5 Kab Kota |
| 75 Orang 5 Sekolah | 75 Orang 5 Sekolah |
|  | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi | 3 Sepeda Motor Roda 2 | 3 Sepeda Motor Roda 2 | 100 | 1.100.000.000 | 1.094.214.952,00 | 99,47 |
| 11 Kali | 11 Kali |
| **14.** | **Persetujuan Hasil AnalisisDampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi** |  |  |  | **9.583.293** | **8.013.250,00** |  |
|  | PengawasanPelaksanaanRekomendasiAndalalin | 5 kali | 5 kali | 100 | 9.583.293 | 8.013.250,00 | 83,62 |
| **15.** | **Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan** |  |  |  | **189.020.000** | **188.915.000,00** |  |
|  | PelaksanaanInspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana uji BerkalaKendaraanBermotor | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 44.217.600 | 44.180.600,00 | 99,92 |
| 7 UPUBKB Kab Kota | 7 UPUBKB Kab Kota |
|  | PelaksanaInspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | 9 Kali | 9 Kali | 100 | 144.802.400 | 144.734.400,00 | 99,95 |
| **16.** | **Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** |  |  | 100 | **352.779.510** | **319.575.227,00** |  |
|  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 242.999.510 | 238.045.378,00 | 97,96 |
|  | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi | 28 Kali | 24 Kali | 86 | 109.780.000 | 81.529.849,00 | 74,27 |
| **17.** | **Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** |  |  |  | **80.000.000** | **69.569.000,00** |  |
|  | FasilitasiPemenuhanPersyaratanPerolehanIzinPenyelenggaraanAngkutan Orang dalamTrayekKewenanganProvinsidalamSistemPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik | 1 Perangkat | 1 Perangkat | 100 | 80.000.000 | 69.569.000,00 | 86,96 |
| 3 Printer | 3 Printer | 100 |
| 2 PC | 2 PC | 100 |
| **III.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN** |  |  |  | **623.939.538** | **593.566.487,00** |  |
| **18.** | **Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi** |  |  | 100 | **115.620.000** | **114.823.520,00** |  |
|  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi | 3 Trayek | 3 Trayek | 100 | 115.620.000 | 114.823.520,00 | 99,31 |
| **19.** | **Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi** |  |  |  | **83.424.538** | **83.394.330,00** |  |
|  | Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi | 4 Trayek | 4 Trayek | 100 | 83.424.538 | 83.394.330,00 | 99,96 |
| **20.** | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional** |  |  |  | **424.895.000** | **395.348.637,00** |  |
|  | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional | 0 Dokumen | 0 Dokumen |  | 8.160.000 | 8.160.000,00 | 100,00 |
|  | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 309.735.000 | 286.494.719,00 | 92,50 |
|  | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional | 1 laporan | 1 laporan | 100 | 107.000.000 | 100.693.918,00 | 94,11 |
| **IV.** | **PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN** |  |  |  | **90.171.250** | **75.735.945,00** |  |
| **21.** | **Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi** |  |  |  | **34.920.000** | **28.819.350,00** |  |
|  | Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 | 34.920.000 | 28.819.350,00 | 82,53 |
| **22.** | **Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi** |  |  |  | **55.251.250** | **46.916.595,00** |  |
|  | Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 55.251.250 | 46.916.595,00 | 84,91 |

PadaPelaksanaanKegiatanTahun 2022dari 4 Program, 22Kegiatan, dan 49 Sub Kegiatanterdapat8 Sub Kegiatan yang RealisasiKeuangannnyadibawah 90%.

**Tabel 2.3**

**Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan**

| **NO** | **Program / Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Permasalahan** | **Upaya Mengatasi Permasalahan** | **Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I** | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** |  |  |  |
| **1** | **Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi** |  |  |  |
| 1 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi | Kegiatan ini merupakan Program Unggulan (Progul) Gubernur Sumatera Barat, dan tidak terlaksana dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi. Sehingga di APBD perubahan 2022 kegiatan ini dihilangkan. | Telah menjadwalkan ulang pelaksanaan pada tahun 2023 dan kami usulkan penambahan anggaran berdasarkan Nota Dinas Nomor 050/587/Dishub-SB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 kepada Gubernur Sumatera Barat  perihal penambahan anggaran pada APBD tahun 2023 untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2023 |  |
| **2** | **Pengelolaan Terminal PenumpangTipe B** |  |  |  |
| 2 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B | Realisasi keuangan89,69 %, sisa anggaran yang belum terealisasi merupakan sisa belanja lembur petugas terminal | Melakukan penghitungan kembali secara cermat kebutuhan belanja, sehingga tidak ada lagi anggaran yang bersisa |  |
| **3** | **Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi** |  |  |  |
| 3 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi | Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan lalu lintas saat lebaran | 1.Melakukan evaluasi secara cermat kebutuhan belanja, kemudian melakukan evaluasi untuk pelaksanaan pengawasan lalu lintas Lebaran dan NATARU dan  2. Mengajukan Usulan penambahan angaran APBD perubahan 2022 dan APBD tahun 2023 untuk mengantisipasi permasalahan lalu lintas ke BAPPEDA melalui surat No 050/417/Dishub-SB-2022 tgl 17 Mei 2022 |  |
|  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PELAYARAN** |  |  |  |
| **4** | **Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional** |  |  |  |
| 4 | Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional | Tidak Terlaksananya Progul karena anggaran tidak mencukupi | Melakukan reschedule pelaksanaan kegiaran ini di tahun 2023 dan mengusulkan penambahan anggaran melalui :  1.Nota Dinas Nomor 050/587/Dishub-SB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 kepada Gubernur Sumatera Barat  2. Telahaanstaf No 552.4/16/Dishub-SB 2022, tanggal 25 Agustus 2022 kepadaGubernur Sumatera Barat  perihal penambahan anggaran pada APBD tahun 2023. |  |

### Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

* 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dicapaidenganpelaksanaan :
     1. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

*Sub Kegiatan* :Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaran Angkutan Perintissehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

* + 1. KegiatanPenyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi*Sub kegiatan*: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, output kegiataniniadalah :

TersedianyaRambuPendahuluPetunjukJurusan (RPPJ) di Ruas Jalan Provinsi

Tersedianya perlengkapan jalan pada ruas jalan provinsi di Sumatera Barat

* + 1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi*Sub kegiatan* :Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan, dengan output kegiatan ini adalah Ruas Jalan Provinsi yang direhab dan dipelihara perlengkapan jalannya. Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 3 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian targetProgram Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

* 1. Program Pengelolaan Pelayaran ,dicapai dengan pelaksanaan :
     1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi

*Sub kegiatan* : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengawasan pelaksanaan usaha angkutan laut perintis, Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

* + 1. Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

*Sub kegiatan* : Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengawasan trayek lintas penyeberangan, Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

* + 1. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

*Sub Kegiatan* : Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional. Output kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. Sehinggasecaraotomatisakanmeningkatkancapaian program

* + 1. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

*Sub Kegiatan* :Pengoperasian pemeliharaaan pelabuhan pengumpan. Output kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen P3D Regional pelabuhan laut pengumpan. Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Dari 4 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Pengelolaan Pelayaran.

* 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ,dicapaidenganpelaksanaan :
     1. KegiatanPengelolaan Terminal PenumpangTipe B

*Sub Kegiatan* :PeningkatanKapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B. Dengan output kegiataniniadalahJumlah SDM Pengelola Terminal Tipe B yang DitingkatkanKapasitasnya. Sehinggasecaraotomatisakanmeningkatkancapaian program.

* + 1. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

*Sub Kegiatan* :Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya pengumpulan data Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum.

* + 1. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

*Sub Kegiatan* :Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan output kegiatan ini adalah Tersedianya data dan perawatan sistem informasi perijinan angkutan umum. Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

* + 1. KegiatanPengelolaan Terminal PenumpangTipe B

*Sub Kegiatan* :PenyusunanRencana Pembangunan Terminal PenumpangTipe B. Dengan output kegiatan ini adalah TersedianyaDokumenStudiKelayakanPemanfaatan dan Pengoperasian Terminal Tipe B yang Tersusun.

Sehinggasecara otomatis akan meningkatkan capaian program.

* + 1. KegiatanPengelolaan Terminal PenumpangTipe B

*Sub Kegiatan* :Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal. Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksanya pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe B.

Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

* + 1. KegiatanPengelolaan Terminal PenumpangTipe B

*Sub Kegiatan* :Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung). Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Fasilitas Utama dan Pendukung Terminal Tipe B.

Sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

* + 1. Kegiatan Audit dan InspeksiKeselamatan LLAJ di Jalan.

*Sub Kegiatan* :Pelaksanaan inspeksi, audit, dan pemantauan terminal.Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya inspeksi, audit, dan pemantauan terminal. Sehinggasecara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 7kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

* 1. Program PengelolaanPerkeretaapiandicapaidenganpelaksanaan :
     1. Kegiatan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

*Sub Kegiatan* :Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan KA Provinsi. Dengan output kegiatan ini adalah Jumlah Penetapan Kelas Stasiun Pada Jaringan Jalur KA di Prov Sumbar.

* + 1. Kegiatan Penetepan jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi.

*Sub Kegiatan* :Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian Pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi. Dengan output kegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan KAsehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dengan output kegiatan ini adalah terlaksananya Pengawasan terhadap pelayanan penyeberangan perintis dan angkutan pelayaran rakyat di sumbarsehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 2 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Penyelenggaraan Perkeretaapian.

* 1. Program PengelolaanPerkeretaapiandicapaidenganpelaksanaan :
     1. Kegiatan Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian daerah pelabuhan pengumpan regional.

*Sub Kegiatan* : Pembangunan pelabuhan pengumpan regional.

Dengan output kegiatan ini adalah Jumlah dokumen FS pelabuhan penyeberangan Sinakak yang tersedia.

Kegiatan tersebut mendukung secara langsung pencapaian target Program Pengelolaan Pelayaran

* 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) ,dicapai dengan pelaksanaan :
     1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi

*Sub Kegiatan* : Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi. Dengan output kegiatan ini adalah Tersusunnya rencana induk jaringan LLAJ Provinsi.

* + 1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi.

*Sub kegiatan* : Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi. Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya Koordinasi dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LlajProvinsi sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

* + 1. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi.

*Sub kegiatan* : Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi. Dengan output kegiatan ini adalah

1. Jumlah Kabupaten Kota yang Dilakukan Pengawasan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi.
2. Jumlah peserta penyuluhan sosialisasi keselamatan LLAJ
   * 1. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi.

*Sub kegiatan* : Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin. Dengan output kegiatan ini adalah Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan rekomendasi Andalalin sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

* + 1. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi.

*Sub kegiatan* : Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan provinsi. Dengan output kegiatan ini adalah Jumlah rapat forum LLAJ dan Rapat Bidang Transportasi yang dilaksanakan sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

* + 1. KegiatanAudit dan InspeksiKeselamatan LLAJ di Jalan.

*Sub kegiatan* :Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan bermotor. Dengan output kegiatan ini adalah jumlahInspeksi dan Audit serta Pemantauan Unit PKB sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program

Dari 6 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

* 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dicapai dengan pelaksanaan :
     1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

*Sub Kegiatan* :Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan output kegiatan ini adalah Nilai evaluasi SAKIP SKPDsehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

* + 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

*Sub Kegiatan* :Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan output kegiatan ini adalah Tersususnnya dokumen laporan tingkat kepuasan internal organisasi, sehingga secara otomatis akan meningkatkan capaian program.

Dari 2 kegiatan seluruhnya mendukung secara langsung pencapaian target Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

## KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana table berikut :

**Tabel 2.4**

**Kebijakan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022**

| **No** | **KebijakanStrategis** | **Dasar Hukum** | **Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Pengembangan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi kawasan aglomerasi perkotaan dan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil | Perda Provinsi Sumatera Barat No 6 tahun 2021 | Dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan pelayanan angkutan perintis terhadap angkutan jalan perintis. Telah terawasinya 2 daerah di Sumatera Barat yaitu Kab Pasaman Barat, dan Kab Dharmasraya dengan tujuan angkutan bus perintis sebagai pemutus mata rantai kesenjangan keterbatasan penyediaan layanan umum di bidang transportasi |
| 2 | Pengembangan layanan transportasi untuk mendukung pariwisata | Perda Provinsi Sumatera Barat No 6 tahun 2021 | Terawasinya pelabuhan pengumpan regional dan penyebrangan dalam mendukung pariwisata di Sumatera Barat |
| 3 | Penyediaan dukungan pembangunan fasilitas keselamatan kereta api | Perda Provinsi Sumatera Barat No 6 tahun 2021 | Dengan tujuan peningkatan keamanan dan keselamatan masyarakt di titik persinggungan antara jalaur perkeretaapian dan lalu lintas angkutan jalan atau perlintasan sebidang di provinsi Sumatera Barat. Masalah yang dapat diselesaikan menyediakan fasilitas keselamatan pada perlintasan sebidang kereta api di perlintasan jalan sawahan – perlintasan jalan pulo aie. |
| 4 | Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perhubungan | PerdaProvinsi Sumatera Barat No 6 tahun 2021 | Dengan tujuan penambahan sumber daya manusia perhubungan yang berkompeten di bidang transportasi. Masalah yang dapat diselesaikan dengan pelaksanaan diklat / sosialisasi pada tahun 2022 |
| 5 | Penataan system perizinantransportasi | PerdaProvinsi Sumatera Barat No 6 tahun 2021 | Dengan tujuan terdatanya perizinan angkutan umum AKDP atau AJDP di Sumatera Barat. Masalah yang dapat diselesaikan terdatanya angkutan AKDP/AJDP yang mengurus perizinan pada tahun 2022 |

## TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Terhadap rekomendasi DPRD, Pansus LKPJ, dan Fraksi atas LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, telah ditindaklanjuti dengan kebijakan, program dan kegaitan yang dilaksanakan Pada Tahun anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

### Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

**Tabel2.5**

**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rekomendasi DPRD Tahun N-1** | **TindakLanjut** | **Tujuan Masalah Yang Diselesaikan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Melakukan kerjasama pengelolaan terminal type B dengan pihak ketiga dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan terminal dan meningkatkan kontribusi pada penerimaan daerah | Pada tahun 2022 belum ada Kerjasama dengan pihak  ketiga dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan  Terminal dan meningkatkan kontribusi pada  penerimaan daerah, namun pada tahun 2022 ini dalam upaya mengoptimalisasi penerimaan dan meminimalisir kebocoran PAD, sudah dilkaukan MoU dengan Bank Nagari Syariah untuk menggunakan aplikasi e retribusi (non tunai) dalam pemungutan retribusi terminal dan baru dilakukan di terminal Bukit Surungan Padang Panjang. | Untuk mengoptimalkan PAD yang diperoleh dari sektor pelayanan terminal penumpang type B |
| 2. | Mengalokasikan anggaran untuk pembuatan marka jalan dan lampu penerangan pada jalan provinsi, rambu – rambu pada tempat – tempat rawan dan strategis serta pembuatan marka Zona Selamat Sekolah ( ZOS) di jalan Provinsi pada lokasi sekolah. | 1. Tahun Anggaran 2021 telah dilaksanakan pengadaan  dan pemasangan perlengkapan jalan di jalan Provinsi:  a) Ruas Jalan Batusangkar – Ombilin P.070  b) Ruas Jalan Rao – Rokan (batas Riau) P. 095  c) Ruas Jalan Panti – Simpang Empat P.031  d) Ruas Jalan Padang Aro – Lubuk Malako P.096 melalui  sub kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan  perlengkapan jalan  2. Untuk Tahun 2022 kami telah mengalokasikan  anggaran untuk pemasangan perlengkapan jalan  a) Belanja Komponen Rambu – Rambu di ruas Jalan  Padang Aro – Lubuk Malako P.096 di Kab. Solok  Selatan (Lanjutan)  b) Belanja Komponen Rambu – Rambu Ruas jalan teluk  bayur – nipah -purus dan Kawasan Mesjid Raya  melalui kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan  Perlengkan Jalan  c) Pengadaan Pemasangan Rambu RPPJ Wisata di Kota  Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pariaman, dan Kab.  Agam  3. Untuk pembuatan marka jalan dan lampu penerangan  jalan provinsi, Rambu – Rambu pada tempat – tempat  rawan dan strategis serta pembuatan marka Zona  Selamat Sekolah (ZoSS) di jala Provinsi pada lokasi  Sekolah akan dialokasi anggaran tahun 2023  4. Untuk Pembuatan marka Zona Selamat Sekolah di  jalan Provinsi kami akan berkoordinasi dengan Dinas  BMCKTR terhadap kondisi permukaan jalan | Untuk menjamin keselamatan pengendaraa pada lokasi – lokasi tertentu yang merupakan daerah rawan dan strategis pada ruas jalan provinsi. Serta menjamin keselamatan setiap siswa yang memiliki lokasi sekolah pada ruas jalan provinsi |
| 3. | Merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk Pembangunan dermaga pada danau yang menjadi kewenangan provinsi sehingga dapat dikelola menjadi sumber PAD | Secara lintasan Danau yang menjadi kewenangan provinsi  hanya Danau Singkarak yg menghubungi 2 Kabupaten yaitu  Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok.  Hanya saja dari kajian yg dilakukan Ditjen Perhubungan  Darat, Danau Singkarak "Potensinya Pariwisata" dan  sekarang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata  Nasional (KSPN), sementara untuk angkutan orang dan  barang lebih efektif dan efisien melalui akses darat (jalan  lingkar) yg sudah ada di sekeliling danau. | Untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Provinsi dan meningkatkan PAD daerah dari sektor pelayanan Transportasi. Untuk saat ini terkait dengan upaya penambahan sumber PAD belum dapat dilaksanakan, tetapi dari sisi konektivitas yang merupakan indikator daerah telah dapat terkoneksi dengan adanya jalan lingkar yang menghubungkan 2 Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat |
| 4. | Meningkatkan Koordinasi dengan dinas Perhubungan Kab/Kota terkait pengawasan tonase kendaraan, khususnya yang menempuh ruas jalan provinsiagar dapat menghindari kerusakan jalan yang lebih parah dan akan membuat biaya pemeliharaan lebih tinggi | 1. Melakukan Koordinasi dengan Dishub Kota Padang  Kab. Dharmasraya , Solok Kota , Kab. 50 Kota dan Kab.  Padang Pariaman terkait Pelaksanaan pengawasan  Kendaraan Angkutan Penumpang umum / Barang (  Tonase ) dengan pola sidang di tempat (  Riksaranmorgabpolsipat )  2. melakukan pengawasan Kendaraan Angkutan Penumpang umum / Barang ( Tonase ) dengan pola  sidang di tempat ( Riksaranmorgabpolsipat ) di Kota  Padang Kab. Dharmasraya, Solok Kota, Kab. 50 Kota  dan Kab.Padang Pariaman,  3. Melakukan Koordinasi dengan Dishub Kota Bukittingi  terkait pelaksanaan pengawasan Kendaraan Angkutan  Penumpang umum / Barang ( Tonase ) dengan pola  sidang di tempat ( Riksaranmorgabpolsipat )  4. Akan Melaksanakan pengawasan Kendaraan Angkutan  Penumpang umum / Barang ( Tonase ) dengan pola  sidang di tempat ( Riksaranmorgabpolsipat ) di Kota  Bukittinggi  5. Akan Melakukan Koordinasi dengan Dishub Kota  Sawahlunto / Kab. Sijunjung terkait pelaksanaan  pengawasan Kendaraan Angkutan Penumpang umum  / Barang ( Tonase ) dengan pola sidang di tempat (  Riksaranmorgabpolsipat )  6. Akan Melaksanakan pengawasan Kendaraan Angkutan  Penumpang umum / Barang ( Tonase ) dengan pola  sidang di tempat ( Riksaranmorgabpolsipat ) di Kota  Sawahlunto / Kab. Sijunjung  7. Telah dilakukan Koordinasi ke Dishub Kab 50 Kota dan  Dishub Kab. Tanah Datar untuk pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Jalan Provinsi dengan Prioritas yang  mengalami rusak berat pada ruas jalan Batas Kota  Payakumbuh – Halaban – Sp. Setangkai ( P. 044 )  8. Telah dilakukan pengambilan titik lokasi Survey pada  ruas jalan tersebut.  9. Melakukan survey pengambilan sample untuk data  Inspeksi Keselamatan Jalan ( IKJ ) pada ruas Jalan P.  044.  10. Melakukan koordinasi Tim untuk tindak lanjut IKJ  bersama Tim Ahli dan Instansi Terkait lainnya.  11. Melakukan Konsinyering dengan Tim Ahli  12. Koordinasi Tim IKJ dan Tim Ahli untuk data dan  penyusunan Dokumen IKJ  13. Melaksanakan FGD dengan unsur – unsur terkait  14. Ekspose Akhir Dokumen IKJ  15. Cetak Dokumen IKJ dan Pendistribusian serta  pelaksanaan untuk dapat ditindaklanjuti oleh instansi  terkait sesuai rekomendasi  16. Koordinasi dengan Dishub Kab / Kota terkait rencana  pengawasan setelah IKJ dan perencanaan untuk IKJ  Tahun berikutnya  17. Melakukan Koordinasi dengan Dishub Kab. 50 kota,  Pesisir Selatan dan Kota Bukittingi terkait Pembuatan Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan  Angkutan Jalan ( RAK – LLAJ )  18. Melakukan Rapat koordinasi tentang pelaksanaan  Pembuatan Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan ( RAK – LLAJ )  19. Melaksanakan proses dan tindak lanjut pembuatan  Draft Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan  Angkutan Jalan ( RAK – LLAJ )  20. Melaksanakan Rapat Koordinasi FLLAJ Prov. Sumbar  tentang penyelenggaran / pengawasan Angkutan  ODOL menuju Zero ODOL 2023 dengan Dishub Kab /  Kota Se – Sumbar, BPTD Wil – III Prov. Sumbar,  Ditlantas Polda Sumbar dan Anggota Forum LLAJ  lainnya  21. Berkoordinasi dengan Dishub Kab. Agam, Kota  Padang, BTPD Wil – III Prov. Sumbar, Ditlantas Polda  Sumbar dan Instansi terkait lainnya melakukan  pemotongan kendaraan ODOL berdasarkan barang  bukti hasil pengawasan oleh BPTD Wil – III Prov.  Sumbar di bengkel karoseri jl. By - Pass Padang  22. Melaksanakan seminar Daerah penyelenggaraan  Pengujian Kendaraan Bermotor dengan  mengikutsertakan penguji Kendaraan Bermotor Dishub Kab / Kota se - Sumbar dengan tema “peningkatan Akreditasi UPUBKB demi mewujudkan  pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang  Professional, Unggul dan berintegritas di Provinsi Sumatera Barat” | Untuk menghindari resiko keselamatan lalu lintas dan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan dengan tonase berlebih yang beroperasi. Sehingga dapat menurunkan tingkat kecelakaan dan menekan anggaran yang dikeluarkan untuk pemeliharaan jalan khususnya jalan Provinsi |

### TindaklanjutRekomendasiPansus LKPJ

**Tabel2.6**

**TindakLanjutRekomendasiPansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **RekomendasiPansus LKPJTahun N-1** | **TindakLanjut** | **TujuanMasalah Yang Diselesaikan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. |  | | |
| 2. |
| 3. |

### TindakLanjutrekomensaiFraksi

**Tabel 2.7**

**TindakLanjutRekomendasiFraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Rekomendasi Fraksi DPRD Tahun N-1** | **TindakLanjut** | **TujuanMasalah Yang Diselesaikan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** |  | | |
| **2.** |
| **3.** |

## 

## PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera BaratTahun 2021menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

**Tabel 2.8**

**Penghargaan yang Diraih Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Penghargaan** | **PemberiPenghargaan** | **PenerimaPenghargaan** | **Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | | | |
| 2 |
| 3 |

# BAB III

# CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUANDAN PENUGASAN

## **URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN**

### Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 **tidak** mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan

### Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 tidak melaksanakan pelimpahan wewenang kepada Dinas perhubungan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## **HAMBATAN / PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN**

### Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Diatasnya

1. **Permasalahan**

Dinas PerhubunganProvinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 **tidak** mendapatkan tugas pembantuan urusan pemerintahan dari pemerintah tingkat diatasnya.

1. **Upaya Penyelesaian**

Dinas PerhubunganProvinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 tidak mendapatkan tugas pembantuan urusan pemerintahan dari pemerintah tingkat diatasnya.

### Permasalahan dan Upaya Penyelesaian Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Dibawahnya

1. **Permasalahan**

Dinas PerhubunganProvinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 tidak mendapatkan tugas pembantuan urusan pemerintahan dari pemerintah tingkat dibawahnya.

1. **Upaya Penyelesaian**

Dinas PerhubunganProvinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 tidak mendapatkan tugas pembantuan urusan pemerintahan dari pemerintah tingkat dibawahnya.

# BAB IV

# PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal yang merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi SumateraBarat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan tonggak untuk pembangunan Sumatera Barat pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.